

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ketidaknetralan kepala desa masih terjadi meskipun telah di terbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, hal ini di sebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di kabupaten Bone Bolangoyang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan.

5.2 Saran

Untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada di kabupaten Bone Bolango panitia pengawasan pemilu perlu melakukan pengawasan yang lebih intens serta tepat sasaran. Bentuk pengawasan yang ideal untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada yaitu dengan memberikan kewenangan langsung kepada BAWASLU RI untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang terlibat dalam proses pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Badudu, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan

Burhan Ashhofa, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pustaka Utama

Fadjar. Mukthie. 2013. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang :Setara Press

Jimly Asshidiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Bip

Jhonson, 2000. *Ilmu Politik suatu pengantar*, Jakarta : Djambatan Marbun, Sf. Dan Moh. Mahfud, Et. Al., (Ed), 2001 *Dimensi-Dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*, Uii Press, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta. Pustaka Utama

Ridwan Hr. 2006 *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Pt Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Gramedia

Soewoto Mulyosudarmo. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar Htn Dan Hand An In-Trans, Malang

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Muis, Abdul. 2009. *Peran Partai politik terhadap pendidikan demokrasi masyarakat*. Vol.1 No.8 Januari Tahun 2009 (online)

Zamroni. 2013. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta :Penerbit Ombak

B. UNDANG-UNDANG

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008

UU Pemilu No. 10 tahun 2008 tentang DPR, DPD, dan DPRD